



LAPORAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

PERANGKAT DAERAH



KAPANEWON DEPOK
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kapanewon Depok Tahun 2025. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan implementasi *Good Governance* (Tata pemerintahan yang baik) yang mencakup pencapaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, oleh karenanya saran yang membangun selalu kami harapkan untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan sebagai evaluasi untuk bahan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sleman, 23 Januari 2026.

Panewu Depok



DJOKO MULJANTO, SP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680327 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON DEPOK.....	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. KEPEGAWAIAN.....	8
E. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KAPANEWON DEPOK.....	9
BAB II.....	10
CAPAIAN INDIKATOR.....	10
KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	10
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	10
B. URUSAN SEKRETARIS DAERAH.....	11
C. URUSAN KEWILAYAHAN	13
D. DANA KEISTIMEWAAN	37
E. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI.....	41
F. DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGAS PEMBANTUAN	41
BAB IV	42
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2024.....	42
BAB V	44
PENUTUP	44
LAMPIRAN I.....	73-77
LAMPIRAN II.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian ASN Kapanewon Depok Berdasarkan Urusan.....	8
Tabel 2.2 Rincian Anggaran, Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	9
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Tahun 2025.....	10
Tabel 4.4 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kelembagaan Tahun 2024.....	11
Tabel 5.5 Capaian Indikator Kinerja Renstra	13
Tabel 6.6 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kelembagaan Tahun 2025.....	14
Tabel 7.7 Capaian Kinerja Anggaran (Pagu) Dana Keistimewaan.....	38
Tabel 8.8 Capaian Kinerja Anggaran (Pagu) Urusan Kelembagaan.....	40
Tabel 9.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2024	42

BAB I

PENDAHULUAN

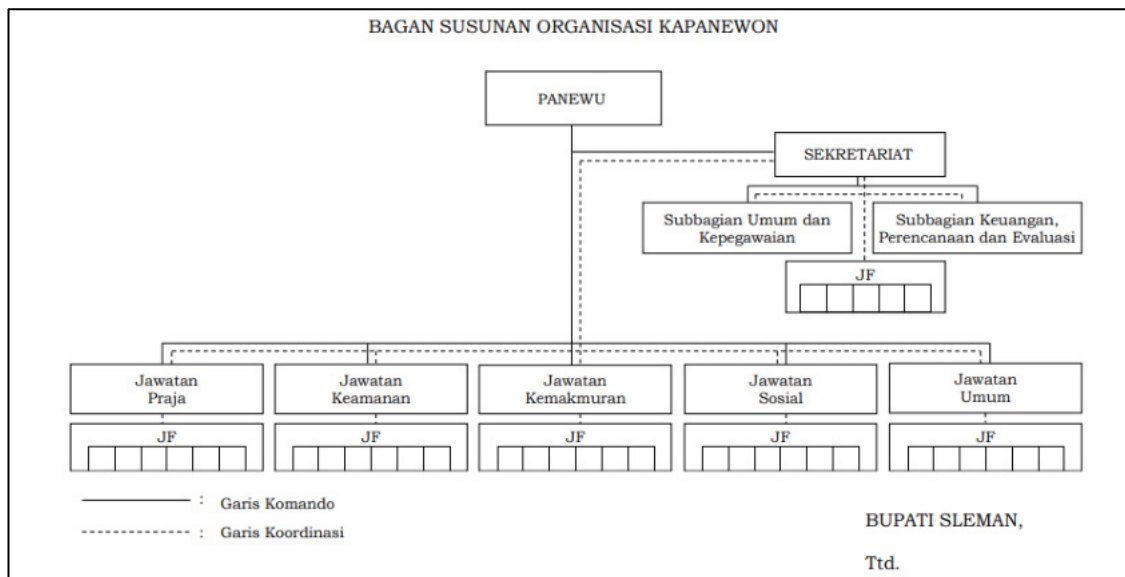
A. DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Kapanewon Depok mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon diatur melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2024.

B. STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON DEPOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024, maka susunan organisasi Kapanewon Depok sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon

Fungsi Kapanewon

Sebagaiman Tugas Pokok Kapanewon yang telah diuraikan diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:

1. Panewu

Panewu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon.

Panewu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kalurahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

- h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
- m. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, serta penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kapanewon;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kapanewon; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kapanewon.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kacamatan;

- d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- g. Memverifikasi pelaporan SPJ

5. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
- f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- g. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan;
- h. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang tata ruang; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Praja.

6. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Keamanan.

7. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Kemakmuran. Bagian Kelima Jawatan Sosial.

8. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati;
- e. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan; dan

- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Sosial.

9. Jawatan Umum

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Umum

D. KEPEGAWAIAN

Komposisi kepegawaian di Kapanewon Depok periode 31 Desember 2025 berjumlah 28 ASN. Komposisi pegawai tersebut terbagi atas 3 (Tiga) urusan sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Rincian ASN Kapanewon Depok Berdasarkan Urusan

No	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Kecamatan	7	1	16	24
2.	Kebudayaan	1	-	1	2
3.	Sekretariat Daerah	1	-	1	2
Jumlah		9	1	18	28

E. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KAPANEWON DEPOK

Rincian anggaran, realisasi keuangan dan capaian kinerja Keuangan Kapanewon Depok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Anggaran, Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Urusan/ Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
A.	Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	29.789.900,00	99,30
	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	29.789.900,00	99,30
B	Urusan Sekretariat Daerah	38.125.000,00	37.683.175,00	98,84
	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	38.125.000,00	37.683.175,00	98,84
C.	Urusan Kewilayahan/ Kecamatan	5.048.635.972,00	4.878.312.256,00	96,62
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.167.422.487,00	4.013.728.048,00	96,31
		158.698.620,00	157.981.275,00	99,55
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	260.448.640,00	251.640.810,00	96,62
	3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	153.101.370,00	149.220.351,00	97,47
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	233.432.355,00	231.556.072,00	99,20
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.532.500,00	74.185.700,00	98,22
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	JUMLAH	5.116.760.972,00	4.945.785.331,00	96,66

Jumlah anggaran Kapanewon Depok pada tahun 2025 sebesar Rp5.116.760.972,00 terealisasi sebesar Rp4.945.785.331,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,66%.

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Tingkat capaian indikator kinerja program urusan kebudayaan di Kapanewon Depok dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Tahun 2025

No.	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	event	1	1	100,00%

1. Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.789.900,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,30%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yaitu nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dari target yang ditetapkan sebesar 1 (satu) event dan tercapai 1(satu) event dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.789.900,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,30%. Keluaran (output) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya adalah jumlah laporan gelar budaya

yogyakarta dengan target sebesar 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terdiri atas subkegiatan Gelar Budaya Jogja dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.789.900 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,30%. Subkegiatan Gelar Budaya Jogja memiliki keluaran (output) jumlah laporan gelar yogyakarta dengan target sebesar 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan diantaranya:

- a. Regulasi dana keistimewaan yang terlambat mengakibatkan kegiatan terkesan kurang terencana dengan baik.
- b. Proses administrasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan danais yang *rigit dan* panjang siklusnya.

B. URUSAN SEKRETARIS DAERAH

Tingkat capaian indikator kinerja program Urusan Sekretariat Daerah di Kapanewon Depok dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kelembagaan Tahun 2025

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Proporsional	%	90	90	100,00%

1. Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp38.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.683.175,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,84%.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yaitu persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, dari target yang ditetapkan sebesar 90,00 % tercapai 90,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Keistimewaan dengan alokasi anggaran Rp38.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.683.175,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,84%. Keluaran (output) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Keistimewaan adalah Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan terdiri atas Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.683.175 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,84,66%.

Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan memiliki keluaran (output) Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sekretariat Daerah diantaranya:

- a. Regulasi dana keistimewaan yang terlambat mengakibatkan kegiatan terkesan kurang terencana dengan baik.
- b. Proses administrasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan danais yang rigid dan panjang siklusnya.
- c. Banyaknya Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan dari Kalurahan yang tidak terakomodir membuat Kalurahan enggan

untuk mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

C. URUSAN KEWILAYAHAN

Capaian Indikator Kinerja pada Renstra Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Sesuai dengan Renstra Kapanewon Depok tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5.5
Capaian Indikator Kinerja Renstra

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai AKIP	83,35(A)	84 (A)	100,77 %
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	84,15	90,01	106,96 %
3	Jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	3 kalurahan	3 kalurahan	100 %
4	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	100 %	100 %	100 %
5	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	100 %	100 %	100 %

Ketercapaian indikator kinerja pada renstra tersebut tidak lepas dari ketercapaian program yang dilaksanakan oleh Kapanewon Depok, Urusan Unsur Kewilayahan didukung dengan 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp5.048.635.972,00 dan terealisasi sebesar Rp4.878.312.256 (95,34%). Capaian program-program tersebut disajikan pada table 2.3 sebagai berikut:

Tabel 6.6

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintah Bidang Kelembagaan

Tahun 2025

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
	a. Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon	%	31,00	31,00	100,00%
	b. Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40,00	40,00	100,00%
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	%	100,00	100,00	100,00%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu sara	%	100,00	100,00	100,00%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	a. Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu	%	85,,00	85,00	100,00%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2025 dianggarkan Rp4.167.422.487,00 dan terealisasi 96,31% yaitu Rp4.013.728.048,00. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- a) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- b) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja, dari target yang telah ditetapkan 100,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp49.064.350,00 dengan realisasi sebesar Rp46.915.380,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 95,62%. Keluaran (output) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menggunakan anggaran sebesar Rp39.235.750,00 dan terealisasi sebesar Rp37.315.075,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,10%.

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai keluaran (output) jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 5 (lima) dokumen dan terealisasi 5 (lima) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp1.159.050,00 dan terealisasi sebesar Rp1.126.297.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan 99,98%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp945.300,00 dan terealisasi sebesar Rp863.358,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 91,33%.

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp1.713.750,00 dan terealisasi sebesar Rp1.685.175,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,33%.

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp1.597.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.539.150,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,35%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp348.000,00 dan terealisasi sebesar Rp344.800,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,08%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp4.065.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.041.525,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,42%.

Subkegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 24 (dua puluh empat) dokumen dan terealisasi 24 (dua puluh empat) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp3.273.226.807,00 dengan realisasi sebesar Rp3.1955.033.162,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 96,39%. Keluaran (output) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yaitu persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.193.716.107,00 dan terealisasi sebesar Rp3.079.288.712,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,42%.

Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki keluaran (output) jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan terealisasi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sehingga capaian kinerja 100,00%.

(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp77.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp74.338.000,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,87%.

Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 (dua

belas) dokumen dan terealisasi sebesar 12 (dua belas) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp1.970.700,00 dan terealisasi sebesar Rp1.406.450,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 71,37%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD memiliki keluaran (output) jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dengan target 2 (dua) laporan dan terealisasi 2 (dua) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp71.083.500,00 dengan realisasi sebesar Rp70.660.526,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,40%. Keluaran (output) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu persentase layanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi anggaran subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp71.083.500,00 dengan realisasi sebesar Rp70.660.526,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99.40%. Keluaran (output) Subkegiatan

Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yaitu jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi keuangan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp130.036.730,00 dari anggaran sebesar Rp124.015.001,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 95,37%. Keluaran (output) kegiatan administrasi umum perangkat daerah yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp7.806.200,00 dan terealisasi sebesar Rp7.789.442,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,79%.

Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki keluaran (output) jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target sebesar 4 (empat) paket dan terealisasi sebesar 4 (empat) paket sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp6.203.700,00 dengan realisasi sebesar Rp4.585.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 73,91%.

Keluaran (output) subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 (dua) paket terealisasi 2 (dua) paket sehingga capaian kinerja 100,00%.

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi anggaran pelaksanaan Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp16.957.925,00 dengan realisasi sebesar Rp16.199.326,00 sehingga capaian kinerja keuangan 95,53%.

Keluaran (output) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 2 (dua) paket dan terealisasi 2 (dua) paket sehingga capaian kinerja 100,00%.

(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp26.655.405,00 dan terealisasi sebesar Rp24.044.096,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki keluaran (output) jumlah paket logistik kantor yang disediakan dengan target 2 (dua) paket dan terealisasi 2 (dua) paket sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp6.676.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.577.787,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,53%.

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki keluaran (output) jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target sebesar 2 (dua)

paket dan terealisasi sebesar 2 (dua) paket sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Fasilitas Kunjungan Tamu

Alokasi anggaran Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp9.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.137.200,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,18%.

Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu memiliki keluaran (output) jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu dengan target 10 (sepuluh) laporan dan terealisasi 10 (sepuluh) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp48.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.710.000,00 sehingga capaian kinerja sebesar 99,84%.

Keluaran (output) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 20 (dua puluh) laporan terealisasi 20 (dua puluh) laporan sehingga capaian kinerja 100,00%.

(8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Alokasi anggaran Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp7.347.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.972.150,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,89%.

Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki keluaran (output) jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan target sebesar 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp71.487.100,00 dengan realisasi sebesar Rp69.126.478,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,70%. Keluaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah persentase pemenuhan barang milik daerah yang disediakan dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Pengadaan Mebel

Alokasi anggaran Subkegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp35.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.000.520,00 sehingga capaian kinerja sebesar 98,31%. Keluaran (output) subkegiatan Pengadaan Mebel adalah jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 2 (dua) unit dan terealisasi 2 (dua) unit dengan capaian kinerja 100,00%.

(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp35.883.100,00 dengan realisasi sebesar Rp34.125.958,00 sehingga capaian kinerja sebesar 95,10%. Keluaran (output) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 5 (lima) unit terealisasi 5 (lima) unit sehingga capaian kinerja 100,00%.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp383.836.400,00 dengan realisasi sebesar Rp365.451.777,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,21%. Keluaran (output) kegiatan ini persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian

Kegiatan ini terdiri dari beberapa subkegiatan sebagai berikut:

(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp110.678.300,00 dan terealisasi sebesar Rp105.965.209,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,74%. Subkegiatan ini memiliki keluaran (output) jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp273.158.100,00 dengan realisasi sebesar Rp259.486.568,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,00%. Subkegiatan ini keluaran (output) jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerjanya 100,00%.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar

Rp188.687.600,00 dengan realisasi sebesar Rp182.525.724,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,73%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki keluaran (output) kegiatan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Alokasi anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp97.287.600,00 dengan realisasi sebesar Rp91.654.405,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,21%. Subkegiatan ini memiliki keluaran (output) jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target sebesar 12 (dua belas) unit dan terealisasi sebesar 12 (dua belas) unit sehingga capaian kinerjanya 100,00%.

(2) Pemeliharaan Mebel

Alokasi anggaran Subkegiatan Pemeliharaan Mebel sebesar Rp8.850.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp8.620.600,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 97,41%. Subkegiatan ini memiliki keluaran (output) jumlah mebel yang dipelihara dengan target sebesar 5 (lima) unit dan terealisasi sebesar 5 (lima) unit sehingga capaian kinerjanya 100,00%.

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp46.090,000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.864.600,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 99,51%. Keluaran (output) Subkegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sebesar 10 (sepuluh) unit dan terealisasi sebesar 10 (sepuluh) unit sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp36.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.386.119,00 sehingga memiliki capaian kinerja keuangan sebesar 99,80%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 4 (empat) unit dan terealisasi 4 (empat) unit sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada tahun 2024 dianggarkan Rp158.698.620,00 dan terealisasi 99,55% yaitu Rp157.981.275,00, program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- a) Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, dari target yang ditetapkan sebesar 31,00% tercapai 31,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan

- b) Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu dari target yang telah ditetapkan 100,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan sebesar Rp13.284.030,00 dengan realisasi Rp13.269.000,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 99,89%. Keluaran (output) ini adalah persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang desa yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil musrenbang kapanewon dengan target sebesar 31,00% dan terealisasi sebesar 31,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan terdiri dari Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan alokasi anggaran Rp13.284.030,00 dengan realisasi Rp13.269.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,89%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan target 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan sehingga kinerja yang dicapai 100,00%.

- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp145.414.590,00 dengan realisasi Rp144.712.275,00 sehingga capaian kinerja keuangan

yang dicapai sebesar 99,52%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah persentase layanan perizinan dan *non*perizinan tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga kinerja yang tercapai sebesar 100,00%.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat terdiri dari Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan *Non*perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.414.590,00 dan terealisasi Rp144.712.275,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,52 %. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan *non* perizinan pada urusan pemerintahan dengan target sebesar 12 (dua belas) laporan dan terealisasi 12 (dua belas) laporan sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan pada tahun 2025 dianggarkan Rp260.488.640,00 dan terealisasi Rp251.640.380,00 atau 96,62%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yaitu persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi, dari target yang ditetapkan sebesar 40,00% tercapai 40,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa mempunyai alokasi anggaran Rp260.448.640,00 dengan realisasi sebesar Rp251.640.810,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 96,62%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi dengan target sebesar 40,00% dan terealisasi sebesar 40,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terdiri atas 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:

(1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Alokasi anggaran Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar Rp147.451.500,00 dengan realisasi sebesar Rp138.777.550,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 94,12%. Subkegiatan ini memiliki keluaran (output) jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi anggaran Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp112.997.140,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp112.863.260,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,88%.

Subkegiatan ini memiliki keluaran (output) jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan target sebesar 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 dianggarkan Rp153.101.370,00 dan terealisasi 97,47% yaitu Rp149.220.351,00. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan indikator kinerja program yaitu cakupan gangguan

ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kerja kapanewon, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,00%.

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp145.601.370,00 dengan realisasi Rp141.726.851,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 97,34%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri atas 2 (dua) subkegiatan yaitu:

(1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Alokasi anggaran Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp145.601.370,00 dengan realisasi Rp141.726.851,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 97,34%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan target 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp7.500.00,00 dengan realisasi Rp7.493.500,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 99,91%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah persentase penegakan perda dengan target sebesar 100,00% target ini terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas 1 (satu) subkegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dengan alokasi anggaran Rp7.500.00,00 dengan realisasi Rp7.493.500,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,91%. Keluaran (output) subkegiatan ini yaitu jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia dengan target 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, mempunyai alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp233.432.355,00 , dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp231.556.072,00 sehingga kinerja yang dicapai sebesar 99,20%.

Program ini memiliki indikator kinerja program persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA dari target yang telah ditetapkan 100,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Alokasi anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp233.432.355,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp231.556.072,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,20%. Keluaran (output) kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah adalah persentase aduan permasalahan SARA dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00% .Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah terdiri atas subkegiatan, sebagai berikut:

(1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Subkegiatan ini mempunyai anggaran Rp130.131.355,00 dengan realisasi sebesar Rp129.040,072,00 sehingga kinerja yang dicapai sebesar 99,16%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan target 100 (seratus) orang dan terealisasi 100 (seratus) orang sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

- (2) Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Subkegiatan ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp103.301.000,00 dengan realisasi sebesar Rp102.516.000,00 atau 99,24%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 12 (dua belas) dokumen dengan realisasi 12 (dua belas) dokumen sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa mempunyai alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp75.532.500,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp74.185.700,00 sehingga kinerja yang dicapai sebesar 98,22%. Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja program yaitu:

- a) Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- b) Persentase kalurahan yang melakukan siklus tahunan tepat waktu dari target yang telah ditetapkan 50,00% tercapai 50,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran Rp75.532.500,00. Realisasi dari anggaran tersebut adalah Rp74.185.700,00 sehingga kinerja yang dicapai sebesar 98,22%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah persentase desa yang melakukan siklus tahunan desa tepat waktu dengan target sebesar

100,00%, dari target tersebut terealisasi sebesar 100,00% sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terdiri atas subkegiatan sebagai berikut:

(1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Alokasi anggaran subkegiatan ini Rp4.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.211.100,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 99,67%. Keluaran (output) subkegiatan ini adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dengan target yang ditetapkan 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau capaian kinerjanya 100,00%.

(2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran subkegiatan ini Rp16.057.500,00 dengan realisasi sebesar Rp15.966.500,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 98,43%. Subkegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa ini memiliki keluaran (output) jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka tata pemerintahan desa dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen sehingga kinerja yang dicapai 100,00%.

(3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp7.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.863.000,00 sehingga kinerja keuangan yang dicapai sebesar 96,66%. Subkegiatan ini mempunyai keluaran (output) jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,00%.

- (4) Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Alokasi anggaran subkegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp6.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.832.800,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,75%.

Subkegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa memiliki keluaran (output) jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dengan target sebesar 3 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

- (5) Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Alokasi anggaran subkegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sebesar Rp22.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.026.200,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,89%.

Subkegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa memiliki keluaran (output) jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan target sebesar 3 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

- (6) Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Alokasi anggaran subkegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp13.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.237.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 92,70%.

Subkegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum memiliki keluaran (output) jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan target sebesar 2 dokumen dan

terrealisasi sebesar 2 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

(7) Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

Alokasi anggaran subkegiatan fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa sebesar Rp6.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.049.100,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.

Subkegiatan fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa memiliki keluaran (output) jumlah dokumen fasilitas dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dengan target sebesar 3 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kecamatan diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kapanewon Depok mengakibatkan beban pekerjaan menjadi lebih besar pada Unit Jawatan/Subbagian sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal.
- b. Banyaknya sistem aplikasi elektronik yang harus digunakan namun tidak terintegrasi satu dengan lainnya membuat pekerjaan tidak efektif dan cenderung berulang.
- c. Keterbatasan anggaran pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak semua masyarakat/kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan di Kapanewon.
- d. Beberapa kegiatan yang menentukan waktu pelaksanaannya adalah Dinas/Badan di tingkat Kabupaten, yang terkadang tidak sinkron dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Depok.

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. DANA KEISTIMEWAAN

1. Urusan Kebudayaan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

b. Capaian Kinerja Anggaran (Pagu)

Tabel 7.7
Capaian Kinerja Anggaran (Pagu) Dana Keistimewaan

No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	30.000.000,00	29.789.900,00	99,30

Kapanewon Depok mendapat alokasi anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi Rp29.789.900,00 atau 99,30%. Dana Keistimewaan pada Kapanewon Depok terdiri atas 1 (satu) program, 1(satu) kegiatan dan 1(satu) subkegiatan.

c. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu adat, seni, tradisi dan lembaga budaya dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.789.900,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,30%. Keluaran (output) kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya adalah Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target sebesar 1 event dan terealisasi sebesar 1 event sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya terdiri atas 1 (satu) subkegiatan yaitu gelar budaya jogja dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp29.789.900,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,30%. Keluaran (output) subkegiatan gelar budaya jogja yaitu jumlah laporan gelar budaya yogyakarta dengan target sebesar 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

2. Urusan Kelembagaan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6) Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

b. Capaian Kinerja Anggaran (Pagu)

Tabel 8.8

Capaian Kinerja Anggaran (Pagu) Urusan Kelembagaan

No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	38.125.000,00	37.683.175,00	98,84

Kapanewon Depok mendapat alokasi anggaran dana keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2025 sebesar Rp38.125.000,00 dengan realisasi Rp37.683.175,00 atau 98,84%. Dana Keistimewaan pada Kapanewon Depok terdiri atas 1 (satu) program, 1(satu) kegiatan dan 1(satu) subkegiatan.

c. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan alokasi anggaran Rp.38.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.683.175,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 98,84%. Keluaran (output) kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan adalah jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun dengan target sebesar 3 dokumen

dan terealisasi sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan terdiri atas 1 (satu) subkegiatan yaitu penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan dengan alokasi anggaran Rp38.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.683.175,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 98,84%. Keluaran (output) subkegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan yaitu jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun dengan target sebesar 3 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%

d. Permasalahan dan Solusi

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja urusan kebudayaan adalah adanya komitmen pimpinan, pegawai kapanewon dan kalurahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dana keistimewaan tahun 2027 disertai anggaran yang memadai, serta adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat.
- b. Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, waktu menunggu BA Redesain terlalu lama.

B. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI

Tidak terdapat Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang dilaksanakan oleh Kapanewon Depok

C. DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGAS PEMBANTUAN

Tidak terdapat Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Depok

BAB IV
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS
LKPJ TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 9.9

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sleman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2024

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PADA TAHUN ANGGARAN 2025
1.	Melakukan optimalisasi Taman Keluarga yang berada di lingkungan Kantor Kapanewon Depok untuk lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini Taman Keluarga Kapanewon Depok diikuti dalam mendukung program KLA tingkat nasional. Pada Tahun 2023 Taman Keluarga Kapanewon Depok menjadi taman layak anak terbaik I di Provinsi DIY. Peningkatan/pemeliharaan sarana taman keluarga agar tetap terus layak digunakan untuk anak-anak	Prioritas penataan Taman keluarga dengan pemeliharaan taman, pemeliharaan sarana prasarana taman(kursi, permainan anak) dan pemeliharaan jogging track. Saat ini Taman keluarga dimanfaatkan untuk kegiatan siswa-siswa di SD maupun TK yang berada di sekitar kapanewon Depok.
2.	Mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum melalui inovasi KOLAK MADU (Kolaborasi Cipta Kondisi Keamanan dan Ketertiban Umum) di Kapanewon Depok, yang digagas oleh Jawatan Keamanan Kapanewon Depok.	Untuk tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi Inovasi KOLAK MADU DEPOK kepada warga, relawan-relawan, dan Satlinmas di 3 (tiga) Kalurahan di wilayah Kapanewon Depok
3.	Penguatan koordinasi/sinergi dengan Dinas/Aparat dan berbagai pihak terkait guna melaksanakan pencegahan dan penegakan penggunaan napza dan minol.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur , Kalurahan Maguwoharjo dan Polsek Depok Raya, termasuk dengan Koramil 11 Depok bersama-sama untuk saling bersinergi untuk pencegahan dan penegakan penggunaan Napsa dan Minol di wilayah Kapanewon Depok
4.	Kapanewon melakukan pendampingan pelaksanaan Reformasi Kalurahan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan dimana setiap	Inovasi PEDULI DADI (Pelayanan Adminduk Langsung jadi dapat ditunggu)Dianggarkan dalam DPA Kapanewon Depok tahun 2024, 2025, dan tahun 2026 2. Terfasilitasinya kepastian dan kemudahan akses administrasi,kependudukan bagi masyarakat, Mengurangi praktik percaloan, dan mengakselerasikan proses dokumen Adminduk agar cepat selesai dapat

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PADA TAHUN ANGGARAN 2025
	kalurahan mendapatkan anggaran sebesar 100 juta untuk mendukung agenda-agenda strategis bagi kalurahan. Implementasi Inovasi PEDULI DADI (Pelayanan Adminduk Langsung jadi dapat ditunggu)	ditunggu sehingga dapat segera bermanfaat bagi masyarakat.
5.	Koordinasi intensif dengan kelompok pengelola sampah mandiri di bawah Jaringan Pengelola Sampah Mandiri TRI KARYA MANDIRI Kapanewon Depok (saat ini sudah terbentuk 85 KPSM dan 3 JPSM di masing-masing kalurahan) Memberikan fasilitasi KPSM melalui anggaran PUPM, APBD Kapanewon dan APBKal	Intensif mensosialisasikan Gerakan Depok memilah Sampah (GEDE LAMPAH) dan melanjutkan dengan PAPAHA SANI (Pilah Sampah Sejak Dini) bagi pendidik PAUD bekerjasama dengan akademisi dan JPSM Sehati Sleman. Saat ini sudah terbentuk 90 KPSM. Pembinaan selain difasilitasi APBD Kapanewon juga menggunakan APBKalurahan. Mengaktifkan peran JPSM tri Karya Mandiri untuk mendampingi KPSM
6.	Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Kalurahan dengan Mengundang Narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas PMK, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Akademisi.	Kapanewon Depok melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring terhadap penyusunan produk-produk hukum yang disusun oleh pemerintah kalurahan, seperti Perkal RKP, Perkal APBKal, Perkal Penjabaran APBKal, Penyusunan LPJ, dan produk hukum yang sesuai dengan Siklus Tahunan Kalurahan dengan melibatkan Dinas PMK. Kapanewon Depok juga melakukan pendampingan pada saat Pemerintah Kalurahan mengajukan Ijin Gubernur pemanfaatan tanah kalurahan mulai dari proses permohonan rekom FPR, penyusunan SK Lurah dan SK persetujuan BPKal, Rekomendasi Panewu, sampai dengan penyusunan perjanjian sewa atau kerjasama dengan melibatkan Dinas PMK, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum dan Panitikismo.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan mengacu pada tata kerja organisasi yang telah ditetapkan, Kapanewon Depok di tahun 2025 telah berhasil menyelesaikan tugas dan fungsinya melalui 8 program 16 kegiatan dan 44 subkegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan. Kapanewon Depok dalam hal serapan anggaran maupun pencapaian fisik sudah optimal, yaitu dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.945.785.331,00 dari total anggaran sebesar Rp. 5.116.760.972,00 atau capaian kinerja keuangan pada tahun 2025 sebesar 96,66%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00 %.

Capaian kinerja keuangan yang tidak bisa mencapai 100 % ini merupakan konsekuensi dari adanya efisiensi anggaran, dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan. Dalam pencapaian kinerja selama satu tahun berjalan tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon berjalan dengan baik.

Memperhatikan hasil capaian kinerja tahun 2025, pada tahun mendatang Kapanewon Depok akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Depok, 23 Januari 2026
Panewu Depok



DJOKO MULJANTO, S.P.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680327 199803 1 00

LAMPIRAN I**Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025**

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025								
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
KAPANEWON DEPOK	5.116.760.972,00		4.945.785.331,00	96,66				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	30.000.000,00		29.789.900,00	99,30				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00		29.789.900,00	99,30				
Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi					Event	1	1	100.00
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00		29.789.900,00	99,30				
Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					Jumlah	1	1	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00		29.789.900,00	99,30				
Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					Laporan	1	1	100.00
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	38.125.000,00		37.683.175,00	98,84				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	38.125.000,00		37.683.175,00	98,84				
Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional					%	100	100	100.00
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	38.125.000,00		37.683.175,00	98,84				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2025, Fasilitasi, Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan RB Kalurahan, Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Keistimewaan kalurahan Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026					Dokumen	3	3	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	38.125.000,00	1.793.000,00	37.683.175,00	98,84				
Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024					Dokumen	3	3	100.00
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.688.787.622,00		4.688.787.622,00	95.61				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.167.422.487,00		4.013.728.048,00	96,31				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran					%	100	100	100.00
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja					%	100	100	100.00
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	49.064.350,00		46.915.380,00	95,62				
Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.235.750,00		37.315.075,00	95,10				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen	5	5	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.159.050,00		1.126.297,00	97,17				
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dokumen	3	3	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	945.300,00		863.358,00	91,33				
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.713.750,00		1.685.175,00	98,33				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.597.500,00		1.539.150,00	96,35				
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	348.000,00		344.800,00	99.08				
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					Laporan	2	2	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.065.000,00		4.041.525,00	99.42				
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan	24	24	100.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.273.226.807,00		3.155.033.162,00	96,39				
Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.193.716.107,00		3.079.288.712,00	96,42				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang	28	28	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.540.000,00	2.420.000,00	74.338.000,00	95,87				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Dokumen	12	12	100.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.970.700,00		1.406.450,00	71,37				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan	2	2	100.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.083.500,00		70.660.526,00	99,40				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Persentase layanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	71.083.500,00		70.660.526,00	99,40				
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Dokumen	1	1	100.00
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Orang	22	22	100.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.036.730,00		124.015.001,00	95,73				
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum					%	100	100	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.806.200,00		7.806.200,00	99,79				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	4	4	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.203.700,00		4.585.000,00	73,91				
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.957.925,00		16.199.326,00	95,53				
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Paket	2	2	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.655.405,00		24.044.096,00	90,20				
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.676.000,00		6.577.787,00	98,53				
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					Dokumen	1	1	100.00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.600.000,00		9.137.200,00	95,18				
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					Laporan	10	10	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48.790.000,00		48.710.000,00	99,84				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	20	20	100.00
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.347.500,00		6.972.150,00	94,89				
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Dokumen	1	1	100.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.487.100,00		69.126.478,00	96,70				
Persentase pemenuhan barang milik daerah yang disediakan					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	35.604.000,00		35.000.520,00	98,31				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.883.100,00	1.757.142,00	34.125.958,00	95,10				
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit	5	5	100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.836.400,00		365.451.777,00	95,21				
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.678.300,00		105.965.209,00	95,74				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan	1	1	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		273.158.100,00		259.486.568,00	95,00				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Laporan	1	1	100.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		188.687.600,00		182.525.724,00	96,73				
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD						%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		97.287.600,00		91.654.405,00	94,21				
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan						Unit	12	12	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	8.850.000,00	229.400,00	8.620.600,00	97,41				
Jumlah Mebel yang Dipelihara					Unit	5	5	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	46.090.000,00		45.864.600,00	99,51				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Unit	10	10	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.460.000,00		36.386.119	99,80				
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas					Unit	4	4	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158.698.620,00		157.981.275,00	99,55				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon					%	31	31	100.00
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu					%	100	100	100.00
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.284.030,00		13.269.000,00	99,89				
Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon						31	31	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	13.284.030,00		13.269.000,00	99,89				
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Laporan	1	1	100.00
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	145.414.590,00		144.712.275,00	99,52				
Persentase layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	145.414.590,00		144.712.275,00	99,52				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					Laporan	12	12	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	260.448.640,00		251.640.810,00	96,62				
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi					%	40	40	100.00
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	260.448.640,00		251.640.810,00	96,62				
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	147.451.500,00	8.649.900,00	138.777.550,00	94,12				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					Dokumen	1	1	100.00
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.997.140,00		112.863.260,00	99,88				
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Laporan	1	1	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.101.370,00		149.220.351,00	97,47				
Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon					%	100	100	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.601.370,00		141.726.851,00	97,34				
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon					kali	12	12	100.00
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	145.601.370,00	4.660.750,00	141.726.851,00	97,34				
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Laporan	1	1	100.00
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan	7.500.000,00		7.493.500,00	99,91				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
Persentase penegakan perda					%	100	100	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	7.500.000,00		7.493.500,00	99,91				
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Laporan	1	1	100.00

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	233.432.355,00		231.556.072,00	99,20				
Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA					%	100	100	100.00
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	233.432.355,00		231.556.072,00	99,20				
Persentase aduan permasalahan SARA yang ditangani					%	100	100	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130.131.355,00	680.230,00	129.040.072,00	99,16				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,								

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	Sub Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	103.301.000,00		102.516.000,00	99,24				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.532.500,00		74.185.700,00	98,22				
	Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu					%	100	100	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	75.532.500,00		74.185.700,00	98,22				
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.225.000,00		4.211.100,00	99,67				
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Dokumen	3	3	100.00
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.057.500,00		15.966.500,00	99,43				
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka					Dokumen	3	3	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.100.000,00		6.863.000,00	96,66				
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Dokumen	3	3	100.00
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.850.000,00		6.832.800,00	99,75				
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					Dokumen	3	3	100.00

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		22.050.000,00		22.026.200,00	99,89				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Dokumen	3	3	100.00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000,00		12.237.000,00	92,70				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Dokumen	3	3	100.00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.050.000,00		6.049.100,00	99,99				

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025								
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Des					Dokumen	3	3	100.00

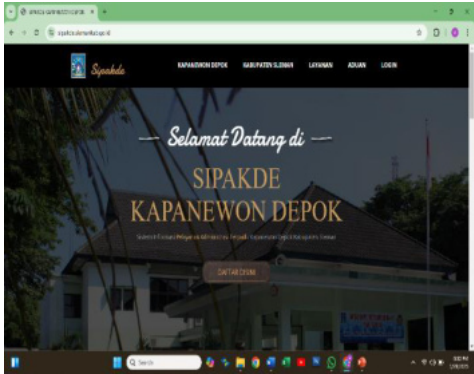
LAMPIRAN II

Data Inovasi Kapanewon Depok

INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 KAPANEWON DEPOK

Data Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2025

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
G. Urusan Kecamatan		
1. Kado Dilan (Kendaraan Antar Dokumen untuk difabel dan lansia)  Pelayanan Asimetris melalui Layanan Prioritas bagi kelompok rentan (Difabel, Lansia dan Ibu Hamil) untuk mewujudkan keadilan dalam pemberian pelayanan publik.	Jawatan Umum	Kapanewon Depok

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
2. Sipakde (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Depok)  Memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang akan mengurus KTP, KK atau surat yang lainnya apabila hilang/rusak, termasuk informasi aduan soal keamanan infrastruktur, layanan dan lain lain.	Jawatan Umum	Kapamewon Depok
3. Gede Lampah (Gerakan Depok Memilah Sampah)  Adalah inovasi Kapanewon Depok untuk mengatasi masalah sampah dengan mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah tangga melalui edukasi, pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM), dan pendampingan, sejalan dengan Peraturan Bupati Sleman dan respons terhadap surat edaran pengelolaan sampah, menjadikannya percontohan pengelolaan sampah mandiri di wilayah Sleman.	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Depok

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
4. Jakadara (Jaringan Kader Adminduk Depok Agar Tertib dan Tertata)  Kapanewon Depok kembali Raih Juara I GISA Award 2024: Dedikasi Terbaik untuk Melayani Warga Sadalah Hasil inovasi Kapanewon Depok untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat dengan melibatkan kader untuk membantu sosialisasi dan pengurusan dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, serta mendukung Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) melalui pembinaan rutin dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas kader.	Jawatan Umum	Kapanewon Depok
5. Papah Sani (Pilah Sampah Sejak Dini)  Inovasi PAPA SANI menjadi satu satunya inovasi pengelolaan sampah yang menysar ke anak usia dini dan belum ada inovasi serupa yang diimplementasikan di instansi atau kapanewon lain di Kabupaten Sleman, sehingga inovasi ini menjadi langkah awal edukasi pengelolaan sampah di bagian hulu atau sumber sampah dengan melibatkan peran dari anak anak PAUD di Kapanewon Depok	Jawatan Kamakmuran	Kapanewon Depok

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
6. Peduli Dadi (Pelayanan Adminduk Langsung Jadi Dapat Ditunggu)  Peduli Dadi Merupakan upaya Kapanewon Depok untuk Mengakselerasi pelayanan publik, khususnya Dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk), dengan catatan : Sistem Aplikasi SIAK tidak Offline, Blanko KTP tersedia, dan diajukan sebelum pukul 14.00 WIB	Jawatan Umum	Kapanewon Depok
7. Jebol Target (Jemput Bola Pemutakhiran Data KK dan KTP Elektronik)  Jebol Target Merupakan upaya aktif Kapabewon Depok memutakhirkan data kependudukan dengan turun langsung/jemput bola di kalurahan, padukuhan, RT/RW, maupun melalui mekanisme undangan ke Kapanewon Depok dalam rangka mewujudkan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	Jawatan Umumj	Kapanewon Depok

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
8. Kolak Madu (Kolaborasi Cipta Kondisi Keamanan dan Ketertiban umum)  Sebuah kolaborasi sinkronisasi dan kerjasama berbagai pihak untuk menjaga, mengelola dan menciptakan kondisi Kapanewon Depok secara keseluruhan dimana Kapanewon Depok sebagai sentral koordinasi bersama, TNI, Polri, Linmas Kalurahan, Jaga warga Padukuhan dan seluruh elemen masyarakat bersatu demi Wilayah Kapanewon Depok yang aman tentram damai.	Jawatan Kemanan	Kapanewon Depok

LAMPIRAN II
Data Prestasi Kapanewon Depok Tahun 2025

Data Prestasi Kapanewon Depok Tahun 2025

Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik DIY	Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	Kapanewon Depok

